

COLLABORATIVE KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PARIWISATA BERKELANJUTAN, AGROWISATA PETIK APEL DESA TULUNGREJO, KOTA BATU

Reygina Marta Dewi, Ali Roziqin, Tri Sulistyaningsih, Mohammad Syahrul Gunawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: areyginagrnd@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the active role of the Batu city government in increasing sustainable tourism and to find out the impact experienced by the community in the ongoing process of apple picking agro-tourism in the village of Tulungrejo, Batu City. By using this type of qualitative research. Sources of data in the form of interviews, observation and documentation, then the data is analyzed using data reduction, data presentation and data verification / drawing conclusions. The result of this research is that the Government is aggressively promoting the potential for entertainment tourism and natural tourism owned by Batu City, the impact is that tourist visits are increasing, and the opportunities for increasing the number of visitors to pick are getting bigger. At this time the lowest opportunity factor is the factor of "Cooperation with the Department of Agriculture", which is less important because the Service Government does not actively participate in disseminating information and promoting apple picking tours to the Makmur Abadi Farmer Group. The community is trying their best in developing agro-tourism in Tulungrejo Village with how to respect each other and compete fairly in managing agro-tourism in Tulungrejo Village.

Keywords : Government, sustainable tourism, collaborative

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu sektor yang dapat mengintegrasikan kemajuan perekonomian baik skala nasional, regional, hingga global (Setijawan, 2018). Kehadiran pariwisata berkelanjutan yang lebih berkualitas dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat sehingga menjadi program utama Kemenparekraf/Baparekraf (Diem, 2021). Pemerintah diarahkan untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan mengingat pada 2021 proyek sektor pariwisata mulai pulih. Berdasarkan hasil survey cepat Markplus Tourism pada kampanye mengenai pariwisata yang berkelanjutan dapat dimulai dengan menyerukan aspek perilaku wisatawan yang bertanggungjawab kepada masyarakat luas.

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan berwisata sudah menjadi kebutuhan sekunder bagi setiap orang. Semakin padatnya aktivitas yang dilakukan seseorang akan berimbas pada besarnya kebutuhan untuk mendapatkan hiburan yang menyenangkan untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari ataupun sekedar berkumpul bersama keluarga. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha pariwisata untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pariwisata apabila ditinjau dari tingginya kenaikan jumlah kedatangan wisatawan di Indonesia.

Pariwisata berkelanjutan sendiri yang dapat dilakukan dengan mengembangkan ekowisata. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

Di waktu yang akan datang, kecenderungan wisata global lebih banyak akan berkunjung ke desa-desa terpencil untuk melihat sesuatu yang belum pernah di lihat di negaranya sendiri. Salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di desa adalah agrowisata.

Kota Batu memiliki peluang untuk lebih dikembangkan sebagai daerah wisata yang lebih menarik, hal ini didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang sangat mendukung. Kota Batu juga banyak menyediakan tempat rekreasi dan edukasi yang bisa dijadikan tempat berliburan yang sangat diminati oleh keluarga dan bahkan banyak sekolah yang mengajak liburan siswanya untuk berkunjung ke Kota Batu.

Atraksi wisata di Kota Batu dibuat berbeda antara satu dengan lainnya sehingga tidak terjadi persaingan yang cukup berarti. Sumber daya wisata yang dimiliki oleh Kota Batu cukup beragam dan dapat dengan mudah ditemui karena lokasinya yang relative berdekatan. Hal ini semakin diperkuat setelah pemerintah kota Batu dengan gencar mencanangkan Kota Batu sebagai kota pariwisata. Atraksi wisata yang ada di Kota Batu antara lain ada wisata alam, wisata buatan dan wisata agro. Salah satunya adalah wisata petik apel, Banyaknya pengunjung yang setiap tahunnya melakukan wisata agro kebun apel Batu, membuat perkebunan apel menjadi sector utama perekonomian di wilayah Batu. Dari data jumlah pengunjung wisata agro pada tahun 2013 sebanyak 15.414 pengunjung, ditahun 2014 naik drastic sebanyak 163.852 pengunjung, dan di tahun 2015 sangat drastic naiknya pengunjung yang datang yaitu sebanyak 283.053.2 Setiap tahunnya akan selalu ada pengunjung yang mencoba merasakan sensasi bertani buahapel dan menikmati kesegarannya langsung di tempat. Mereka juga menjual apel-apel tersebut dengan harga petani apabila pengunjung ingin menjadikannya sebagai oleh-oleh untuk sanak saudara di rumah.

Dalam mengembangkan atau menciptakan tempat wisata Pemerintah mempunyai peran penting karena sector pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan dan mempromosikan tempat wisata

tersebut. Adanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat membantu daerah wisata dalam mengembangkan potensi wisata di daerah tersebut karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Instansi dari Pemerintah Daerah yang bertugas langsung untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Dengan adanya Bidang Pariwisata perencanaan strategis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih teratur, dapat merumuskan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, adanya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, adanya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, adanya pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggara dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, adanya pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan kualitas tempat wisata tersebut, tempat membuat perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang seni budaya dan pariwisata, member pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata dan meningkatkan pengembangan apresiasi seni budaya, serta pembinaan pengembangan obyek wisata pentas seni budaya rekreasi dan aneka hiburan.

Adapun usaha pemerintah yang tidak sedikit untuk pengembangan bidang pariwisata, salah satunya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Batu dengan meningkatkan posisi peran kota sentrawisata sampai menjadi kota kepariwisataan internasional yang dilakukan oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu me latar belakang penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian pustaka (*literature review*) dari berbagai sumber yang terkait dengan collaborative kebijakan pemerintah kota batu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, agro wisata petik apel desa tulungrejo, kota batu. Penelitian ini adalah

penelitian kualitatif deskriptif. Pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normative menekankan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan yuridis seperti pada undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi pendekatan yuridis normative merupakan suatu penelitian yang meneliti kebijakan pemerintah kota batu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. Pembahasan ini, penulis memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage untuk mengakses data dan informasi terkini. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan agrowisata petik apel di DesaTulungrejo, Kota Batu

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini adalah ingin mengetahui apakah pemerintah serius untuk mewujudkan rencana yang telah mereka buat. Harapan dari adanya implementasi kebijakannya itu memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan. Maka peneliti menggunakan 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Setyawan, 2017:126-127) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Keempat (4) factor ini saling bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain.

Untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini maka harus diadakannya kerjasama-kerjasama baik itu pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Jika kebijakan ini dalam pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pemerintah dan swasta, bisa dipastikan juga pelaksanaan kebijakan ini tidak akan berjalan dengan efektif. Sehingga, untuk menghindari penolakan terhadap pembangunan pariwisata ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Adanya partisipasi masyarakat ini pemerintah dan swasta akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka pasti akan mendukung sepenuhnya terkait pembangunan pariwisata di Kota Batu.

1) Komunikasi.

Setiap ada pembangunan objek pariwisata baru di Kota Batu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai actor perencana akan melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas-dinas terkait untuk membahas dan menyesuaikan perencanaan yang mereka buat dengan rencana kerja masing-masing dinas. Komunikasi ini membahas tentang arah pembangunan obyek wisata mulai dari aspek tata ruang yang termasuk di dalamnya kawasan strategis pariwisata; aspek daya tarik wisata, termasuk pola sebaran dan daya tarik wisata. Aksesibilitas pariwisata termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur, sarana angkutan/transportasi dan ketersediaan sarana prasarana lainnya; Pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya tentang keterlibatan masyarakat masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan Investasi pariwisata. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyebarluaskan setiap pesan atau informasi yang akan dilaksanakan. Penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang berada di daerah yang bersangkutan maupun melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat sehingga mereka juga mengetahui

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, perusahaan yang membangun obyek pariwisata diwajibkan untuk membuat suatu informasi atau pengumuman berupa baliho yang menerangkan bahwa daerah tersebut sedang dibangun obyek wisata. Pengumuman ini berisi tentang izin lokasi, izin dari dinas terkait, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan setelah pembangunan selesai maka obyek wisata tersebut akan dipromosikan melalui event-event atau website resmi pemerintah Kota Batu. Semua obyek wisata serta fasilitas pendukung pariwisata di Kota Wisata Batu dapat kita lihat di website resmi Pemerintah Kota Batu (website.batukota.go.id serta humasbatu.cloud-astro.com). Kurangnya dari segi komunikasi kepada masyarakat adalah penyampaian informasi tentang pemenang tender yang akan membangun obyek pariwisata.

- 2) Sumberdaya,
Sumberdaya yang dimulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia sampai anggaran untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Sumber daya alam di Kota Batu memang sangat cocok untuk dijadikan Kota Wisata. Hal ini didukung oleh udaranya yang sejuk, pemandangan bentang alamnya yang sangat bagus serta obyek pertaniannya yang bisa dijadikan agro wisata. Jika dilihat dari sumber daya manusianya, pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku actor perencana serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku pelaksana sudah tersedia dan mencukupi juga. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparatur sipil negaranya dan sudah tersedianya staf ahli dan staf pendukung dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Dan untuk mendukung kinerja aparatur

pemerintah yang tingkat pendidikan masih rendah maka dilakukan suatu pelatihan khusus sesuai dengan arah pengembangan pariwisata Kota Batu. Sedangkan, sumber daya anggaran yang digunakan untuk membangun pariwisata di Kota Batu bukan berasal dari APBN maupun APBD. Tetapi, anggaran berasal dari para investor yang ingin berinvestasi di Kota Batu. Pemerintah daerah hanya bertugas untuk memberikan izin, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan obyek wisata. Adapun anggaran yang berasal dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan seperti penyuluhan dan pelatihan kepada para pelaku usaha bukan untuk membangun obyek pariwisata.

- 3) Disposisi atau Sikap
Dalam hal implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, disposisi atau sikap para implementor sudah seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai actor perencanaan sangat menyadari tugas pokok dan fungsi mereka sebagai perencana. Mereka tidak pernah menjanjikan imbalan untuk mendukung ataupun memotivasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas-dinas terkait agar kinerjanya bagus. Begitu pula sebaliknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai actor pelaksana tidak pernah berharap diberi imbalan untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar kinerja mereka baik. Semuanya sudah sadar akan kewajiban mereka masing-masing.
- 4) Struktur Birokrasi.

Pedoman yang digunakan sebagai dasar pengembangan pariwisata Kota Batu adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA). Landasan hukum RIPPDA ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dokumen ini pada dasarnya mencakup materi pokok ketentuan

program kepariwisataan, yang meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Untuk menjalankan pembangunan pariwisata ini, setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Bappelitbangda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup serta dinas-dinas terkait lainnya akan saling berkoordinasi untuk mendukung setiap kebijakan atau program kerja masing-masing dinas sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Selain dinas-dinas terkait, pemerintah akan melakukan kerja sama ataupun koordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada kondisi saat ini, faktor yang memiliki skor tertinggi adalah faktor “Kebijakan Pemerintah tentang penancangan sebagai kota wisata”, menjadi faktor yang sangat penting, karena sejak tahun 2009, Pemerintah gencar mempromosikan potensi pariwisata hiburan maupun pariwisata alam yang dimiliki Kota Batu, dampaknya, kunjungan wisatawan semakin meningkat, dan peluang peningkatan pengunjung petik semakin besar. Peluang Unit Usaha Kelompok Tani Makmur Abadi yang memiliki skor terendah pada saat awal pendirian adalah faktor “Jaringan pemasaran tengkulak yang lebih luas, membuat petani membentuk sendiri akses langsung pada konsumen”, menjadi kurang penting karena dibutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar untuk dapat menyamai jaringan pemasaran tengkulak. Pada saat ini faktor peluang yang terendah adalah faktor “Kerjasama dengan Dinas Pertanian”, menjadi kurang penting karena Pemerintah Dinas kurang aktif berpartisipasi dalam penyebaran informasi maupun mempromosikan wisata petik apel pada Kelompok Tani Makmur Abadi. Kerjasama dengan Dinas yang paling utama adalah tentang riset dan pengembangan budi daya apel, namun

untuk bidang wisata petik sendiri belum ada peran yang signifikan.

3.2. Keterlibatan Masyarakat dalam proses berjalannya pariwisata berkelanjutan di bidang agrowisata petik apel di desa Tulungrejo, Kota Batu

Hubungan yang terjalin antar masyarakat dalam pengelolaan agro wisata sangat bergantung pada aktivitas pariwisata yang terjadi. Selama ini pariwisata dianggap sebagai suatu hal baik yang menyalurkan motivasi positif bagi masyarakat, karena praktek pariwisata yang terjadi menyentuh lapisan masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai keuntungan, baik dalam segi ekonomi maupun non-ekonomi seperti pengetahuan dan cara bersosialisasi dengan wisatawan. Hal demikian yang kemudian menjadikan masyarakat berupaya sebaik mungkin dalam mengembangkan agro wisata di Desa Tulungrejo dengan cara saling menghargai satu sama lain dan bersaing secara sehat dalam mengelola agrowisata di Desa Tulungrejo. Ketika ada permasalahan yang muncul akan dicarisolusinya melalui seorang yang kompeten dalam bidang pariwisata untuk melakukan pendekatan dengan pihak yang berkontra sehingga akan menciptakan komunikasi dan timbul suatu pengertian yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkontra. Selain itu, dalam penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan agrowisata maka akan dicarikan sebuah solusi yang sebisa mungkin tidak akan merugikan masyarakat sehingga kegiatan agrowisata di Desa Tulungrejo akan terus berjalan harmonis. Partisipasi masyarakat dalam penggerakan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pendekatan dan diskusi atas permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan agrowisata, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat bottom-up. Kemudian masyarakat berpartisipasi secara aktif karena dalam pengelolaan agrowisata Top Apel Mandiri masyarakat dianggap sebagai rekan kerja dan bukan sebagai alat atau sekedar penyedia

atraksi wisata semata. Apabila terjadi kontra ditengah-tengah masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan agrowisata, maka dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atas kontra yang terjadi tersebut. Hal ini berarti masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Desa Tulungrejo dapat dikatakan terletak pada tipe Partisipasi Spontan (*Spontaneous Participation*).

Pemerintah sebagai penyelenggara serta Pembina masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena tujuan pengembangan pariwisata ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam pengembangan desa wisata, pemerintah sebagai regulator dan pendukung pelaksanaan pembangunan pariwisata. Pemerintah sebagai penyelenggara pariwisata harus terlibat penuh dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan di suatu daerah. Untuk itu pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sebaiknya mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam suatu pembangunan. Selain itu keterlibatan pemerintah desa juga memberikan kewenangan pengambilan keputusan diberikan kepada masyarakat lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata masih bersifat praktis dan preventif saja. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya pengembangan desa wisata tersebut. Terdapat banyak kasus yang dihadapi Desa Tulungrejo, sebaiknya sosialisasi mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat setempat sehingga mereka tahu dan mengerti apa yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Tulungrejo juga masih kurang sepenuhnya mendukung adanya pengembangan desa wisata, hal ini karena

Pemerintah Desa Tulungrejo tidak terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata.

4. KESIMPULAN

Pemerintah gencar mempromosikan potensi pariwisata hiburan maupun pariwisata alam yang dimiliki Kota Batu, dampaknya, kunjungan wisatawan semakin meningkat, dan peluang peningkatan pengunjung petik semakin besar. Pada saat ini faktor peluang yang terendah adalah faktor “Kerjasama dengan Dinas Pertanian”, menjadi kurang penting karena Pemerintah Dinas kurang aktif berpartisipasi dalam penyebaran informasi maupun mempromosikan wisata petik apel pada Kelompok Tani Makmur Abadi. kerja sama dengan Dinas yang paling utama adalah tentang riset dan pengembangan budidaya apel, namun untuk bidang wisata petik sendiri belum ada peran yang signifikan.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata masih bersifat praktis dan preventif saja. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya pengembangan desa wisata tersebut. Kendala yang dihadapi Desa Tulungrejo, sebaiknya sosialisasi mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat setempat sehingga mereka tahu dan mengerti apa yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Tulungrejo juga masih kurang sepenuhnya mendukung adanya pengembangan desa wisata, hal ini karena Pemerintah Desa Tulungrejo tidak terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata.

REFERENSI

- Aulya, R. M. (2016). Strengthening Local Economy Through Community-Based Tourism In Governance Perspective. *Jurnal Administrare*, 3(2)-11.
- Djajuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 8-21.

- Obot, F. dan Setyawan, D. . (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik* ,hal 113-120.
- Octastefani, T. dan Kusuma, B. M. A. . (2015). Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan ManajemenPublik)*, 3(1), hal 1.
- Priambodo, M. P. (2015). Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan* ,hal. 27-34.
- Rahmasari, A. dan Pudjowati, J. (2017). *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)*. Develop, 1(1).
- Rosdiana, H. I. (2014). *Evaluation of Fiscal Policy on Agropolitan Development to Raise Sustainable Food Security (A Study Case in Bangli Regency, Kuningan Regency and Batu Municipality, Indonesia)*. *Procedia Environmental Sciences.*, hal. 563-572.
- Sukardani,P., et al. (2019). *Tourist Village Program for Modern Tourism: A Study on City Branding ' Shining Batu' of Batu City*. 311-314.
- Wijijayanti, T. et. al. (2020). Rural tourism: A local economic development. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, Hal. 5-13.